

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

KLIPING, EDISI KAMIS 15 JUNI 2023

RINGKASAN BERITA HARI INI

Perlu Solusi Penataan Kota, Sejumlah Titik Masih Ada PKL dan Gepeng

KOTA-Komisari DPRD Sidoarjo menyatakan perhatian khusus yang komprehensif dalam penataan kota guna mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan gepong yang mengganggu pemandangan kota. Sejumlah titik gepong telah diidentifikasi sebagai lokasi yang perlu penataan, namun masih dituntut keberanian PKL dan gepong yang mengganggu ketertarikan dan keindahan kota.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Damron Chudlori mengungkapkan keprihatinannya terhadap masalah tersebut. "Kami mendapati bahwa masih ada sejumlah titik di kota kita yang gepong oleh PKL dan gepong," ujarnya.

Sebagai solusi, ada di sepanjang jalan perumahan Taman Pinang Indah (TPI), di trotoar sepanjang perumahan Gedangan, dan beberapa tempat lainnya yang masih digunakan untuk berjualan. Selain itu, gepong titik seperti di beberapa titik seperti, Alun-alun Sidoarjo, Gedangan, Jalan Raya Candi.

Mensur politik PKB tersebut, upaya yang dilakukan Pemkab Sidoarjo berupa penertiban sudah rutin dilaksanakan. Namun upaya tersebut kurang kuat. Buktinya masih PKL dan gepong masih kembali lagi.

"Untuk itu, DAMRON sangat terintensi dan berkeinginan dalam penataan kota. Upaya yang dilakukan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Selain itu,



OTTERMINKAN: Petugas Satpol PP saat menertibkan PKL yang berjualan di tepi jalan.



BANTUAN: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memberikan beras untuk warga Tulangan.

Pastikan Penyaluran Bantuan Beras Lancar

KOTA-Penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) tahap III dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sidoarjo terus berlangsung. Penyaluran tahap III BSB Kabupaten Sidoarjo dimulai pada awal Juni lalu dan secara simbolis diserahkan oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor kepada lima desa di Kecamatan Tulangan, Rabu (14/6).

Penyaluran BSB tahap pertama dilakukan di Desa Tangkempit dengan jumlah penerima sebanyak 220 KPM. Kemudian dilanjutkan ke Desa Gedangan dengan jumlah penerima 202 KPM, dan di Desa Kepatihan Bupati Sidoarjo secara langsung menyerahkan bantuan kepada 442 KPM. Selanjutnya, penyaluran dilakukan di Desa Kenongo dengan jumlah

Hindari Layanan Banyak Meja Bupati Minta OPD Wajib Digitalisasi

Sidoarjo, Bicara Percepat aplikasi sebagai sarana kerja di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Sidoarjo untuk meningkatkan efisiensi, kinerja antar bagian yang juga salah satu yang membuat aplikasi serba-otomatis. Bupati Sidoarjo berharap, dengan adanya aplikasi serba-otomatis, maka akan meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur sipil negara. Selain itu, aplikasi serba-otomatis juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelayanan publik.

Bupati Ahmad Muhdlor dan Gus Muhdlor meninjau langsung pelaksanaan aplikasi serba-otomatis di beberapa OPD. "Kita harus memastikan bahwa aplikasi serba-otomatis benar-benar bermanfaat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar Muhdlor.

Bupati Gus Muhdlor Kawal Bantuan Sosial Beras di Sukodono

Sidoarjo, Memorandum Bantuan Sosial Beras (BSB) tahap III dari Kemensos RI untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) Kabupaten Sidoarjo mulai disalurkan awal Juni.

Penyerahan secara simbolis dilakukan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali untuk 5 desa di Kecamatan Sukodono pada Selasa, (13/6).

Penyerahan BSB pertama di Desa Wiluyut, total penerima BSB 130 KPM, diserahkan Kepala Dinas Sosial Drs Misbahul Munir, karena Bupati berhalangan hadir. BSB kedua di Desa Kebonggang diserahkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali untuk 5 desa di Kecamatan Sukodono pada Selasa, (13/6).

Penyerahan BSB pertama di Desa Wiluyut, total penerima BSB 130 KPM, diserahkan Kepala Dinas Sosial Drs Misbahul Munir, karena Bupati berhalangan hadir. BSB kedua di Desa Kebonggang diserahkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali untuk 5 desa di Kecamatan Sukodono pada Selasa, (13/6).

Pendes Jati Alun-Alun Gunaan Dana Desa untuk Pembangunan Fisik

Sidoarjo, Pejabat Kepala Desa Jati Alun-Alun Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat (PkM) dan Pengabdian Masyarakat (PkM) di Desa Jati Alun-Alun untuk meningkatkan pembangunan fisik desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, (13/6) dengan melibatkan 100 relawan.

Desa Jati Alun-Alun memiliki luas wilayah 1.200 hektar dengan jumlah penduduk 1.200 jiwa. Desa ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Dengan menggunakan Dana Desa, pembangunan fisik dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program yang akan dilaksanakan adalah pembangunan jalan desa. "Kita akan membangun jalan desa sepanjang 1 km untuk menghubungkan desa dengan jalan utama," ujar Kepala Desa Jati Alun-Alun.

Parkir Bikin Macet, Satlantas Koordinasi Dishub

SIDOARJO - Ilmu yang serba, hari ini banyak yang menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan terjadinya kemacetan di beberapa titik, terutama di kawasan perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini, Satlantas dan Dishub melakukan koordinasi untuk mengatur lalu lintas dan parkir.

Satlantas akan melakukan patroli rutin di kawasan-kawasan yang sering terjadi kemacetan. Dishub akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya disiplin parkir dan penggunaan jalur yang benar.

"Kita akan terus meningkatkan koordinasi antara Satlantas dan Dishub untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas di Sidoarjo," ujar Kepala Satlantas.

SAADAH MUHLOR BUKA WORKSHOP MERDEKA BAGI GURU DAN PENDIDIK PAUD

Sidoarjo, Pejabat Kepala Desa Saadah Muhdlor membuka Workshop Merdeka bagi Guru dan Pendidik PAUD. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru dan pendidik PAUD.

Workshop ini membahas tentang strategi pembelajaran yang inovatif dan kreatif, serta tantangan yang dihadapi guru dan pendidik PAUD. Saadah Muhdlor menekankan pentingnya peran guru dan pendidik PAUD dalam membentuk generasi yang berkualitas.

"Kita harus terus meningkatkan kualitas pembelajaran di PAUD untuk mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan," ujar Saadah Muhdlor.

Dua Candi di Pamotan Diduga Lumbung Padi Kerajaan Majapahit

SIDOARJO - Desa Pamotan, Perong, konon merupakan salah satu wilayah yang sangat tua. Di sana terdapat dua candi yang diduga merupakan lumbung padi kerajaan Majapahit. Candi ini memiliki bentuk yang unik dan menarik, serta memiliki nilai sejarah yang tinggi.

Salah satu candi tersebut memiliki bentuk seperti lumbung padi yang terbuat dari batu. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14. Keberadaan candi ini menunjukkan bahwa Pamotan pernah menjadi bagian dari kerajaan Majapahit.

Penelitian arkeologis akan dilakukan untuk mengungkap lebih lanjut tentang sejarah dan fungsi dari kedua candi tersebut.

Kabupaten Deli Serdang Studi Tiru Pelayanan UPTD ABK Sidoarjo

Sidoarjo, Memorandum Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara mengunjungi Kabupaten Sidoarjo untuk mempelajari pelayanan UPTD (Unit Pelayanan Terpadu) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sidoarjo. Studi tiru ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Kabupaten Deli Serdang.

Tim studi tiru akan melakukan observasi langsung ke UPTD ABK Sidoarjo dan berdiskusi dengan staf yang bertugas. Hasil dari studi tiru akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan UPTD ABK di Kabupaten Deli Serdang.

Kurikulum Merdeka Guru dan Pendidik PAUD Metode Menyenangkan Maksimalisasi Perkembangan Kognitif Anak

Sidoarjo - Tim yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo sedang melakukan sosialisasi Kurikulum Merdeka bagi Guru dan Pendidik PAUD. Kurikulum ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan perkembangan kognitif anak.

Salah satu metode yang diterapkan dalam Kurikulum Merdeka adalah metode yang menyenangkan. Metode ini bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna bagi anak-anak.

"Kita harus memastikan bahwa pembelajaran di PAUD adalah pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tahun Ini Kuota MBR Delta Tirta Menyasar 735 Orang

KOTA-Promosi Delta Tirta Sidoarjo telah berhasil menyasar 735 orang untuk mengikuti program MBR (Membangun Berani Rakyat) Delta Tirta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Delta Tirta akan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung program MBR, termasuk pelatihan, pembinaan, dan pendampingan. Program ini akan berlangsung sepanjang tahun ini.

"Kita akan terus meningkatkan jumlah sasaran MBR Delta Tirta untuk mencapai target yang ditetapkan," ujar Kepala Dinas.

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo

Perlu Solusi Penataan Kota, Sejumlah Titik Masih Ada PKL dan Gepeng

KOTA-Komisi A DPRD Sidoarjo menyatakan perlunya solusi yang komprehensif dalam penataan kota guna mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan gelandangan pengemis (gepeng) di sejumlah titik. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengendalian, namun masih ditemukan keberadaan PKL dan gepeng yang mengganggu ketertiban dan keindahan kota.

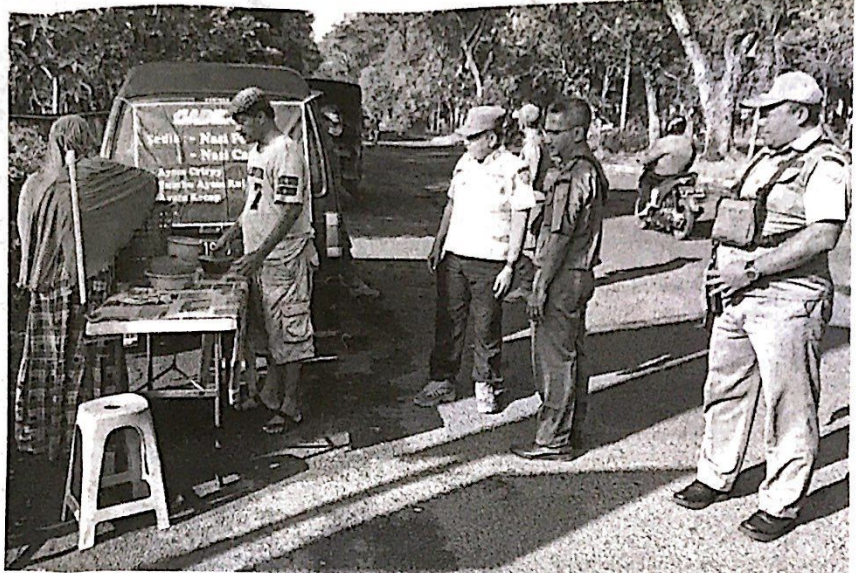
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Damroni Chudlori mengungkapkan keprihatinannya terhadap masalah tersebut. "Kami mendapati bahwa masih ada sejumlah titik di kota kita yang ditempati oleh PKL dan gepeng," ujarnya.

Seperti yang ada di sepanjang jalan perumahan Taman Pinang Indah (TPI),

di trotoar sepanjang perumahan Gedangan, dan beberapa tempat lainnya yang masih digunakan untuk berjualan. Selain itu, gepeng juga terlihat di beberapa titik seperti Alun-alun Sidoarjo, Gedangan, hingga Jalan Raya Candi.

Menurut politikus PKB tersebut, upaya yang dilakukan Pemkab Sidoarjo berupa penertiban sudah rutin dilakukan. Namun upaya tersebut kurang kuat. Buktinya masih PKL dan gepeng masih kembali lagi.

Untuk itu, Damroni menekankan perlunya solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam penataan kota. Upaya yang dilakukan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Selain itu,



DITERTIBKAN: Petugas Satpol PP saat menertibkan PKL yang berjualan di tepi jalan.

diperlukan juga pengawasan yang ketat terhadap kegiatan PKL dan gepeng yang bertentangan dengan aturan.

Dia menyebutkan, PKL bisa dibuatkan sentra kuliner. Sehingga mereka bisa

berjualan dengan nyaman. "Begitu pun dengan pembelinya," katanya.

Dia berharap bahwa melalui kerjasama yang baik antara berbagai pihak dan implementasi solusi yang

tepat, masalah PKL dan gepeng dapat diminimalisir secara signifikan. Hal ini akan berdampak positif pada penataan kota yang lebih tertata dan menyenangkan bagi masyarakat. (nis/vga)



Hindari Layanan Banyak Meja Bupati Minta OPD Wajib Digitalisasi

Sidoarjo, Bhirawa

Penerapan aplikasi sebagai sarana kinerja di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di wilayah Sidoarjo yang masih sendiri-sendiri, bahkan antar bidang pun juga masih ada yang membuat aplikasi sendiri-sendiri membuat Bupati Sidoarjo bertindak tegas. Termasuk layanan, retribusi yang sifatnya masih manual juga bakal dihapus.

Hal tersebut telah ditegaskan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, dalam acara 'Implementasi Elektrifikasi Transaksi' di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo di Ballroom Hotel Luminor, Selasa (13/6) siang.

Bupati Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor meminta sinergisitas elektrifikasi antar dinas berjalan secara holistic, dalam menyelesaikan permasalahan dan memberikan mutu pelayanan yang berkualitas. Saat ini sejumlah instansi tidak bisa lepas dari digitalisasi, terutama dalam lingkup pemerintahan. Selain itu, elektrifikasi juga dapat memangkas birokrasi yang berbelit menjadi lebih mudah. "Digitalisasi sudah menjadi kewajiban sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masy-

arakat dan peningkatan pendapatan," pinta Gus Muhdlor.

Menurutnya, sudah tidak jamannya memberikan pelayanan dan peningkatan pendapatan berbasis manual, sehingga hal ini yang menjadi penghambat dalam proses percepatan pembangunan. "Semakin kita menghindari banyak meja atau birokrasi yang berkepanjangan, maka semakin lebih profesional dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah tidak jamannya memberikan pelayanan manual seperti karcis yang disobek atau birokrasi yang ribet dan berbelit semua harus menerapkan digitalisasi," tegasnya.

Selain itu sejumlah OPD penghasil retribusi juga berkomitmen untuk bersama-sama dalam mengimplementasi elektrifikasi transaksi di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Hal ini ditandai dengan pematangan bersama terkait komitmen penagihan piutang bersama Kajari Sidoarjo dan pematangan komitmen Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) oleh OPD penghasil retribusi.

Badan Pelayanan Pajak Daerah



Bupati Sidoarjo bersama Kejaksaan Negeri Sidoarjo menunjukkan surat kerjasama.

(BPPD) Kabupaten Sidoarjo selaku koordinator menghadirkan Kabag Organisasi, Kajari, Bank Jatim, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta Mendagri serta tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, Ari Suryono menambahkan pembayaran ele-

ktronik sudah menjadi rujukan nasional melalui Bank Indonesia dan Mendagri. "Sebenarnya semua transaksi pembayaran dari sisi pendapatan utamanya, misalnya dinas yang memungut retribusi memang ada beberapa yang belum menerapkan digitalisasi, kalau pajak sudah 100% menerapkan digitalisasi," ungkap Ari. [ach.ca]



BANTUAN: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memberikan beras untuk warga Tulangan.

Pastikan Penyaluran Bansos Beras Lancar

KOTA-Penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) tahap III dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sidoarjo terus berlangsung. Penyaluran tahap III BSB Kabupaten Sidoarjo dimulai pada awal Juni lalu dan secara simbolis diserahkan oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor kepada lima desa di Kecamatan Tulangan, Rabu (14/6).

Penyerahan BSB tahap pertama dilakukan di Desa Pangkemi dengan jumlah penerima sebanyak 220 KPM. Kemudian dilanjutkan ke Desa Gelang dengan jumlah penerima 282 KPM, dan di Desa Kepatihan Bupati Sidoarjo secara langsung menyerahkan bantuan kepada 442 KPM. Selanjutnya, penyaluran dilakukan di Desa Kenongo dengan jumlah

● Ke Halaman 10



Pastikan Penyaluran...

penerima sebanyak 187 KPM, dan terakhir di Desa Singopadu dengan jumlah penerima 280 KPM.

“BSB tahap III ini merupakan tahap terakhir. Program ini sangat penting dan kami harus memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada penerimanya,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor tersebut.

Bupati juga memastikan kepada Kepala Desa Kepatihan bahwa seluruh warga Desa Kepatihan telah menerima BSB mulai dari tahap 1 hingga tahap 3. Kabupaten Sidoarjo telah menerima alokasi sebanyak 276 ribu sak beras. Harapannya, program ini dapat berlanjut pada tahun depan.

“Saya ingin mengingatkan kepada semua warga di sekitar sini, jika ada yang tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, segera laporkan ke Dinas Sosial,” katanya.

Selain melakukan evaluasi, Gus Muhdlor juga melakukan sosialisasi tentang perubahan mekanisme penerimaan bantuan sosial yang menggunakan sistem digital.

“Setelah ini, penerima KPM akan menggunakan undangan berbasis digital, dengan adanya barcode di bagian kanan bawah undangan. Barcode ini, ketika discan, akan langsung mengirimkan informasi ke pusat bahwa penerima tersebut telah menerima bantuan,” jelasnya. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Penandatanganan komitmen bersama dalam *high level meeting* bersama sejumlah DPD pemungut retribusi di *Ballroom Hotel Luminor*.

Layanan Retribusi Manual Bakal Diganti Digital

Sidoarjo, Memorandum

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam waktu dekat ini bakal menghapus layanan retribusi manual diganti skema retribusi digital.

Mempercepat realisasi program tersebut organisasi perangkat daerah (OPD) penarik retribusi menandatangani komitmen bersama dalam *high level meeting* bersama sejumlah OPD pemungut retribusi untuk berdiskusi bersama membahas implementasi elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemkab Sidoarjo di *Ballroom Hotel Luminor*, Selasa (13/6).

Bupati Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor juga meminta sinergitas elektronifikasi antardinas berjalan secara holistik dalam menyelesaikan permasalahan dan memberikan mutu pelayanan yang berkualitas.

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo selaku koordinator menghadirkan Kabag Organisasi, Kajari, Bank Jatim, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kemendagri, serta tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah

Gus Muhdlor mengatakan saat ini sejumlah instansi tidak bisa lepas dari digitalisasi terutama dalam lingkup pemerintahan. Selain itu, elektronifikasi juga dapat memangkas birokrasi yang berbelit menjadi lebih mudah.

"Digitalisasi sudah menjadi kewajiban sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan," kata Gus Muhdlor.

Menurutnya sudah tidak zamannya memberikan pelayanan dan peningkatan pendapatan berbasis manual, sehingga hal ini yang menjadi penghambat dalam proses percepatan pembangunan.

Bupati juga menambahkan bahwa semakin kita menghindari banyak meja atau birokrasi yang berkepanjangan, maka semakin lebih profesional dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Sudah tidak zamannya memberikan pelayanan manual seperti karcis yang disobek atau birokrasi yang ribet dan berbelit semua harus menerapkan digitalisasi," tegas Gus Muhdlor.

Selain itu, sejumlah OPD penghasil retribusi juga berkomitmen untuk bersama-sama dalam mengimplementasi elektronifikasi transaksi di Pemkab Sidoarjo.

Hal ini ditandai dengan pendatangangan bersama terkait komitmen penagihan piutang bersama Kajari Sidoarjo dan pendatangangan komitmen elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (FTPD) oleh OPD penghasil retribusi.

Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono menambahkan pembayaran elektronik sudah menjadi rujukan nasional melalui Bank Indonesia dan Mendagri.

"Sebenarnya semua transaksi pembayaran dari sisi pendapatan utamanya misalnya dinas yang memungut retribusi memang ada beberapa yang belum menerapkan digitalisasi, kalau pajak sudah 100 persen menerapkan digitalisasi," ungkap Ari.

Pihaknya mengatakan tujuan dari *high level meeting* yang digelar bertujuan untuk menyelaraskan pembayaran dan pelayanan berbasis digitalisasi oleh OPD.

"Ini penekananannya di tingkat OPD dulu untuk sosialisasinya nanti tergantung masing-masing OPD. Semoga pelayanan dinas yang masih menggunakan cara konvensional dapat mengikuti perkembangan zaman digital," terang Ari.

Sementara Direktur Kepala Grup Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen intern Bank Indonesia Bandoe Widarto mengapresiasi peningkatan pemahaman kepala OPD terkait manfaat digitalisasi dalam sistem pemerintahan.

"Dari BI sendiri memang mendorong digitalisasi. Kami mendorong tiga hal yaitu digitalisasi bantuan sosial, digitalisasi transaksi pemerintahan daerah, dan digitalisasi transportasi," ungkap Bandoe.

Ia menegaskan digitalisasi transaksi pemerintahan daerah menjadi sangat penting, mengingat dapat meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) dan mewujudkan *e-Government* yang berkualitas dengan menerapkan satu pintu lewat digitalisasi.

Bandoe menerangkan FTPD Sidoarjo mencapai angka 98 persen dari 100 persen yang meliputi semua aspek, untuk menuju angka 100 persen OPD di Sidoarjo harus selaras secara bersamaan menggunakan alat pembayaran elektronik.

"Misalnya transaksi retribusi yang masih menerapkan cara konvensional dengan karcis ini diarahkan untuk menggunakan elektronik," imbuhnya.

Pemkab Sidoarjo terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta keandalan pelayanan publik yang berkualitas melalui *e-Government*. (kri/jok/nov)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Pavingisasi desa Jati Alun-Alun.

Pemdes Jati Alun-Alun Gunakan Dana Desa untuk Pembangunan Fisik

Sidoarjo, Pojok Kiri

Pemerintah Desa (Pemdes) Jati Alun Alun Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, melakukan kegiatan pembangunan pavingisasi di lingkungan RW/01. Pembangunan ini di laksanakan oleh Pemerintah Desa Jati Alun Alun yaitu, membangun jalan pemukiman dengan menggunakan Paving block. Pembangunan tersebut menggunakan anggaran Dana Desa DD tahun 2023 dengan volume 3x50 meter.

“Abdul Manap Kepala Desa Jati ALunAlun saat di wawancarai awak media Pojok Kiri mengatakan jalan pemukiman yang berada di RW/01, dengan harapan adanya pembangunan yang di bangun oleh pemerintah Desa ini dapat di manfaatkan oleh masyarakat sebaik mungkin.

Lanjut Manap pemavingan tersebut menggunakan anggaran dana desa DD tahun 2023 sudah melalui musdes dari usulan warga dan disepakati bersama BPD, LPMD maupun tokoh masyarakat. Pembangunan kita libatkan warga sekitar untuk dipekerjakan, juga tim pelaksana kegiatan desa TPK. Saya berharap dengan jalan yang bagus warga merasa nyaman dalam beraktivitas sehari-hari.

Anggaran dana desa juga akan digunakan untuk usulan warga yang masuk dalam RKPD desa dengan skala prioritas. Tentunya, mengikuti masuknya anggaran ke rekening desa yang bertahap. Selain pembangunan fisik kami juga menganggarkan untuk pemberdayaan masyarakat seperti penanganan Stunting.

Semua pembangunan fisik yang ada di desa Jati Alun-Alun dalam menggunakan anggaran baik dana desa maupun bantuan keuangan BK kita gunakan sesuai keperuntukannya. Azas transparansi anggaran terbuka tak ada yang ditutupi, demi kemajuan desa menuju masyarakat sejahtera. (Lie/Khol)

Bupati Gus Muhdlor Kawal Bantuan Sosial Beras di Sukodono

Sidoarjo, Memorandum

Bantuan sosial beras (BSB) tahap III dari Kemensos RI untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) Kabupaten Sidoarjo mulai disalurkan awal Juni.

Penyerahan secara simbolis dilakukan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali untuk 5 desa di Kecamatan Sukodono pada Selasa, (13/6).

Penyerahan BSB pertama di Desa Wilayat, total penerima BSB 130 KPM, diserahkan Kepala Dinas Sosial Drs Mtsbahul Munir, karena bupati berhalangan hadir. BSB kedua di Desa Kebonagung diserahkan Bupati Sidoarjo kepada 186 KPM. Dilanjut ke

Desa Pekarungan sebanyak 186 KPM. Selanjutnya Desa Suruh 156 KPM. Terakhir di Desa Jumputrejo.

"Bantuan pangan ini semua desa di Kabupaten Sidoarjo mendapatkan BSB. BSB tahap III ini merupakan tahap akhir. Program ini harus dieksekusi hingga ke penerimanya dan masiuhuji coba untuk program selanjutnya," jelas bupati.

Gus Muhdlor panggilan akrab bupati juga memastikan ke Kades Pekarungan Effendi bahwa semua warganya menerima BSB ini mulai tahap I hingga tahap 3. Kemarin Kabupaten Sidoarjo mendapat jatah 276 ribu sak. Harapannya program pusat ini berlanjut tahun depan.



Penyerahan secara simbolis BSB dilakukan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali untuk 5 desa di Kecamatan Sukodono.

"Saya berpesan kalau di sekitar panjenengan semua, jika ada warga yang tidak mampu atau kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari segera lapor ke dinsos kabupaten," pinta bupati.

Sedangkan dari Ketua Satgas Bansos KC Sidoarjo PT Pos Sidoarjo Enjang wagyosuyoso selaku penyalur, BSB tahap III mulai didistribusikan mulai 3 Juni pertama di Kecamatan Jabon. Penyerahan mulai

serentak pada Senin (12/6). "Untuk Kecamatan yang sudah tersalurkan 100 persen saat ini adalah Prambon dan Candi. Untuk total kecamatan yang paling banyak penerima BSB ini adalah Kecamatan Tarik sekitar 8.236 KPM yang paling sedikit Kecamatan Buduran sekitar 2.700-an," jelasnya.

Ia juga menjelaskan total penerima BSB di Kabupaten Sidoarjo sebesar 92.685. Untuk penyaluran BSB ini kolaborasi antara bulog selaku penyedia beras dengan dinas sosial untuk data KPM/data PKH, PT Pos Indonesia selaku penyalur, serta Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo yang berfungsi untuk pengawasan. (kri/jok/nov)

MEMORANDUM BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Kurikulum Merdeka Guru dan Pendidik PAUD

Metode Menyenangkan Maksimalkan Perkembangan Kognitif Anak

SIDOARJO - Yayasan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sidoarjo menyelenggarakan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka bertempat di Aula SMPN 4 Sidoarjo yang digelar mulai tanggal 13-14 Juni 2023.

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran baik di tingkat pendidikan bawah sampai perguruan tinggi, sehingga penerapan kurikulum ini akan berdampak luas pada anak didik termasuk bagi masyarakat.

Kurikulum sendiri menjadi sebuah patokan dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran pada lembaga pendidikan, dengan demikian konsep kurikulum yang wajib dipegang oleh tenaga pendidik adalah kurikulum yang sesuai dengan perkembangan serta peraturan yang telah ditentukan.

Kegiatan workshop diikuti oleh peserta sebanyak 363 orang yang terdiri dari 178 orang pada sesi pertama, dan 185 orang pada sesi kedua ini berasal dari guru dan kalangan pendidik PAUD DWP se-Kabupaten Sidoarjo. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Hj.

Sa'adah Ahmad Muhdlor, S.Hum selaku Pembina Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo.

"Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara dalam minat membaca. Dampak negatif dari kurangnya minat membaca ini menjadikan masyarakat kita tidak mampu bersaing dengan bangsa lain karena minimnya perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu faktor pemicunya yaitu kurang maksimalnya perkembangan anak pada masa usia emas (golden age)" ujar Ning Sasha sapaan Hj. Sa'adah Ahmad Muhdlor.

"Dengan diimplementasikannya Kurikulum Merdeka ini pada pembelajaran PAUD, marilah kita maksimalkan perkembangan kognitif anak dengan metode-metode yang menyenangkan. Kita dukung anak-anak untuk menguasai kemampuan dasarnya terlebih dahulu dan tidak ada lagi ujian calistung untuk anak-anak PAUD yang akan masuk SD" tambahnya.

Melalui slogan "Satu Tim Satu Tujuan, Transisi PAUD ke SD Menyenangkan" yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana, Ny. Sudarwanti, M.Pd., Pengurus Yayasan DWP Sidoarjo ingin menjadikan



Guru dan pendidik PAUD saat mengikuti Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka.

momen yang positif ini untuk saling meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan dalam upaya mencerdaskan anak bangsa yang lebih berkualitas. Penyampaian materi oleh Narasumber Ibu Prof.

Gunarti Dwi Lestari, M.Si., M.Pd dan Bapak Dr. Ng. Tirto Adi MP, M.Pd diikuti dengan sangat antusias oleh peserta.

Jajaran tenaga pendidik diharapkan agar selalu meningkatkan

peran strategis yang siap membangun karakter bangsa, meningkatkan perannya dalam membina sekaligus sebagai suri tauladan yang baik bagi peserta didiknya di tengah-tengah masyarakat. • dar/loe

Akhir Tahun Dinormalisasi, Kini Penuh Enceng Gondok Lagi

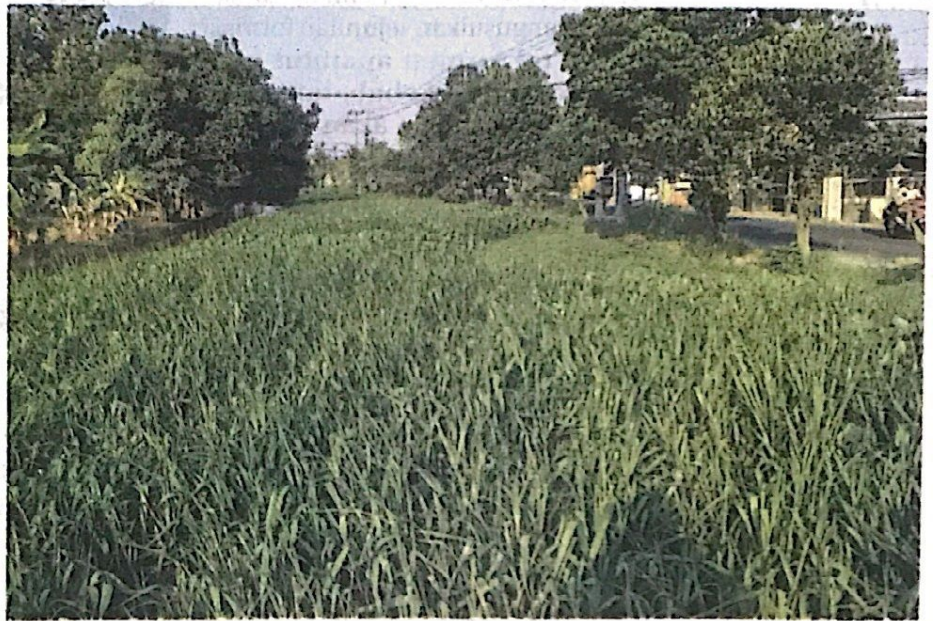
SIDOARJO - Sungai di Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, kembali dipenuhi enceng gondok. Sebagian titik juga tampak sudah dangkal. Padahal, akhir tahun lalu sungai tersebut dinormalisasi.

Anshori, salah seorang warga, mengungkapkan bahwa sudah sekitar tiga bulan ini tidak terlihat ada petugas yang membersihkan sungai di sana. "Dulu ada alat beratnya. Jadi, waktu banyak enceng gondok atau sampahnya, kadang langsung dibersihkan," katanya.

Dia berharap ada upaya pembersihan total di sana. Bukan hanya pembersihan enceng gondok dan sampah, tetapi juga pengangkatan sedimen sungai. "Sebelum musim hujan lagi, harapannya bisa bersih. Takutnya, kalau dangkal, bisa meluber ke rumah warga," ujarnya.

Kabid Ketersediaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Suprayitno menyatakan, pada Desember tahun lalu sungai itu baru saja selesai dinormalisasi. Sebelumnya, alat berat juga diletakkan di sana. "Begitu penuh atau ada sampah kiriman, langsung dibersihkan," ungkapnya.

Setelah normalisasi tuntas, alat berat



SUNGAI TAPI HIJAU: Permukaan sungai di kawasan Tanjungsari, Kecamatan Taman, dipenuhi tanaman enceng gondok kemarin.

dipindahkan. "Akhir Desember alat beratnya kami pindahkan," jelasnya. Meski alat berat sudah dipindah, beberapa kali petugas juga sempat membersihkan sungai saat ada sampah yang menyangkut di sungai.

Suprayitno menjelaskan, sungai cepat dipenuhi enceng gondok karena pertumbuhan enceng gondok sangat cepat. Belum lagi ketika ada kiriman dari atas dan tertahan.

Kemarin (14/6) pihaknya langsung meninjau sungai di Tanjungsari. Tujuannya, mengidentifikasi kebutuhan penanganan. "Segera nanti dibersihkan. Ini juga koordinasi dengan kepala desanya," tuturnya.

Namun, tahun ini tidak ada normalisasi di sungai yang mengarah ke Kali Mas itu. Pihaknya akan kembali mengusulkan normalisasi pada tahun depan. (uzi/c14/any)

Jawa Pos

Tahun Ini Kuota MBR Delta Tirta Menyasar 735 Orang

KOTA-Perumda Delta Tirta Sidoarjo telah berhasil mengajukan kuota sebanyak 735 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kepada pemerintah pusat. Permohonan ini disetujui sebagai langkah untuk memberikan akses air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, saat ini terdapat kabar bahwa 26 orang yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima manfaat MBR mengundurkan diri dari program tersebut.

Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo Dwi Hary Soeryadi menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan air bersih yang ter-

jangkau kepada semua masyarakat. Langkah itu dilakukan untuk membantu MBR.

Dia menjelaskan, sebagai bentuk keringanan bagi penerima manfaat MBR, Delta Tirta memberikan keringanan sebesar Rp 400 ribu untuk biaya pemasangan air bersih. Selain itu, tarif bulanan bagi penerima manfaat MBR masuk dalam golongan II D. "Memiliki tarif yang lebih terjangkau dibandingkan dengan tarif reguler," katanya.

Meskipun terdapat sejumlah pengunduran diri, Dwi Hary Soeryadi menekankan pentingnya kesinambungan program MBR Delta Tirta. Pihaknya akan terus berupaya mem-

berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Sidoarjo.

"Kami juga akan melakukan evaluasi terhadap program ini guna meningkatkan partisipasi dan manfaat yang diberikan kepada para penerima," tambahnya.

Program MBR Delta Tirta Sidoarjo merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Melalui keringanan biaya dan tarif yang terjangkau, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan dasar ini dengan lebih mudah. (nis/vga)



AIR BERSIH: Tempat pengolahan air di Perumda Delta Tirta untuk didistribusikan ke masyarakat.

Kabupaten Deli Serdang Studi Tiru Pelayanan UPTD ABK Sidoarjo

Sidoarjo, Memorandum

Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara mengunjungi Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya adalah studi tiru pelayanan UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sidoarjo, Senin (12/6).

Rombongan dipimpin Bunda PAUD Deli Serdang sekaligus Ketua TP PKK Deli Serdang Yunita Ashari Tambunan. Perempuan tersebut merupakan istri Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan.

Saat tiba di UPTD ABK Sidoarjo, Yunita disambut hangat Bunda PAUD Kabupaten Sidoarjo yang juga Ketua TP PKK Sidoarjo Sa'adah Ahmad Muhdlor, S Hum. Sa'adah tidak lain merupakan istri Bupati Sidoarjo



Rombongan Pokja Bunda PAUD Deli Serdang berkunjung ke Sidoarjo dalam rangka studi tiru pelayanan UPTD ABK.

Ahmad Muhdlor.

Yunita menyampaikan Kabupaten Deli Serdang masih terus berbenah memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Ia melihat Kabupaten Sidoar-

jo mampu mewujudkan pelayanan pendidikan yang baik bagi ABK. Menurutnya ke-

beradaan UPTD ABK Sidoarjo menjadi buktinya.

"Kegiatan kami ini akan menjadi bekal kami dalam membangun pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih baik lagi di daerah kami," ucapnya.

Yunita menilai UPTD ABK Sidoarjo telah mampu memberikan pelayanan pendidikan yang baik bagi ABK di Kabupaten Sidoarjo. Ia akan tiru pelayanan yang ada di UPTD ABK Sidoarjo. Pembangunan pusat pendidikan ABK seperti ini menjadi mimpinya untuk daerahnya.

Sementara Sa'adah Ahmad

Muhdlor mengatakan komitmen terhadap pelayanan ABK tidak hanya dari pemerintah saja. Butuh peran semua pihak untuk mewujudkan pelayanan ABK yang lebih baik. Seperti dari organisasi pendidikan maupun pihak swasta. Selain itu kader PKK juga harus ikut berkomitmen untuk mendukung pendidikan bagi ABK.

"Harus ada peran pentahelix, tidak hanya dari pemerintah kabupaten, swasta, atau dari organisasi pendidikan seperti Himpauldi, IGTKI maupun IGRA, tapi juga peran dari ibu-ibu kader PKK," ucapnya. (kri/jok/nov)

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Total 2.186 Siswa Diterima Jalur Prestasi Nilai Rapor

Berharap Server Tak Lemot saat Jalur Zonasi Dimulai

SIDOARJO - Pendaftaran SMPN jalur prestasi nilai rapor dan jalur perpindahan tugas orang tua berakhir. Kemarin (14/6) siswa yang diterima via dua jalur tersebut diumumkan.

Tepat pukul 14.00, hasil seleksi diumumkan lewat *website* PPDB. Sayang, saat diakses, *website* tersebut sempat lemot. "Loading-nya lama,

agak susah bukanya. Tapi, ini tadi sudah bisa," ujar Sunardi, salah seorang guru. Harapannya, ke depan bisa ada perbaikan server. Terutama saat pendaftaran jalur zonasi pada 19 sampai 21 Juni mendatang. Sebab, pendaftar jalur zonasi paling banyak di antara seluruh jalur.

Kabid Mutu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Netty Lastiningsih menyatakan wajar jika saat pengumuman kemarin memang butuh waktu sedikit lama untuk

mengakses *website* PPDB. Namun, *website* PPDB tidak sampai *down* atau tidak bisa diakses sama sekali. "Karena banyak yang mengakses," katanya. Rata-rata siswa mengakses bersamaan tepat pukul 14.00, tetapi *website* tetap jalan.

Netty menyatakan, siswa yang diterima jalur penilaian rapor sebanyak 2.186 orang. "Ini yang daftar seluruhnya diterima," katanya. Sebab, siswa pendaftar tidak sembarangan. Mereka merupakan siswa terbaik

di kelas. Tiap 14 siswa dipilih satu siswa yang bisa mendaftar. Sementara itu, untuk jalur perpindahan tugas orang tua, ada 536 pendaftar. "Siswa yang diterima 388 siswa," katanya.

Hari ini (15/6) para siswa yang diterima sudah bisa daftar ulang ke sekolah tujuan mereka masing-masing. Kini, penerimaan siswa baru SMPN hanya menyisakan dua jalur lagi. Yakni, jalur afirmasi dan jalur zonasi yang akan dimulai pada 19 sampai 21 Juni mendatang. (uzi/c12/any)

Jawa Pos

Parkir Bikin Macet, Satlantas Koordinasi Dishub

SIDOARJO - Hampir setiap hari, kegiatan parkir di pinggir menunggu antrian bongkar muat barang di PT PANDARIA Jalan Gatot Subroto, Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, seringkali menyebabkan kemacetan mendapat attensi jajaran Satlantas Polresta Sidoarjo dan Dishub beserta Pemerintah Kecamatan.

Diberitakan sebelumnya, keluhan warga MS terkait kendaraan besar (tonase besar) bikin macet, sangat mengganggu pengguna jalan. Memang betul bongkar muatnya itu di dalam, akan tetapi parkirnya menunggu diluar. Jadi keluar masuk bergantian. Ini yang bikin jalannya mobil lain harus gantian juga. Tidak bisa berpapasan," ujar MS.

"Adanya truk parkir yang memakan badan jalan di jalan Gatot Subroto dan Jalan Surowongso, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo langsung mendapat respon cepat dari Satlantas Polresta Sidoarjo, Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo, dan Pemerintah Kecamatan Gedangan," ujar MS Rabu (14/6/23).

Anggota Satlantas Polresta Sidoarjo Ipda Yonandha Adi Yuliansyah beserta anggota lain Satlantas Polresta Sidoarjo langsung mengecek truk yang parkir sembarangan sepanjang frontage.

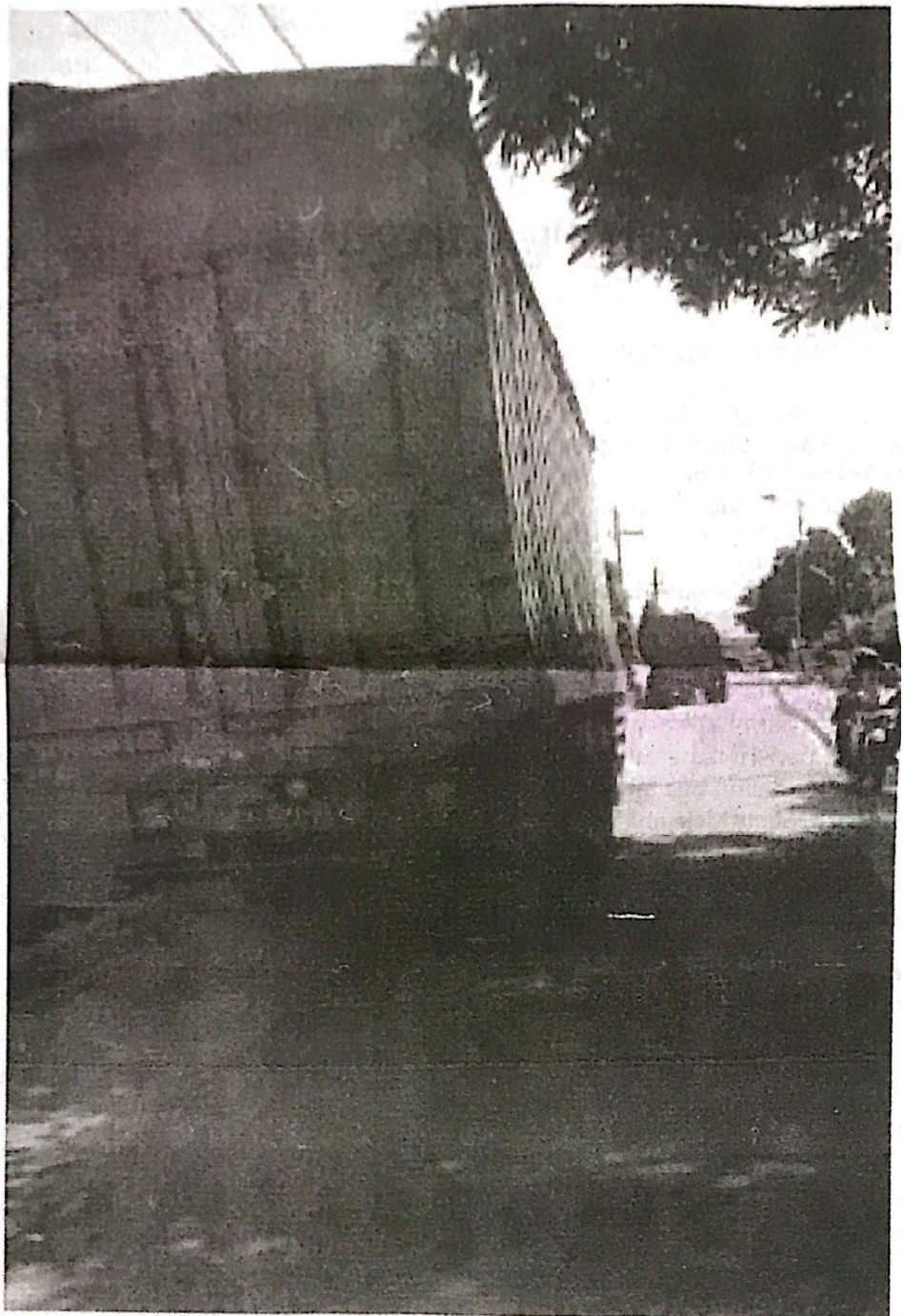
Ipda Yonandha Adi Yuliansyah menghimbau satpam PT AIM untuk memberitahukan pada supir yang antri bongkar muatan, agar dilarang parkir di bahu jalan.

Pihak manajemen PT.MAM/AIM Biscuit juga ditegur agar mengatur antrian bongkar muat yang baik, sehingga tidak terjadi antrian truk sampai ke bahu jalan.

Untuk selanjutnya Satlantas Polresta Sidoarjo berkoordinasi dengan Dishub Sidoarjo untuk memasang rambu-rambu dilarang parkir dan kelas jalan.

"Agar saling menghormati antar pengguna jalan yang lain,"ungkapnya.

Sementara Pemerintah Kecamatan Gedangan pun turut turun tangan. Hari ini, Rabu (14/6/23),



Ruas jalan yang kerap macet mendapat perhatian pihak Satlantas, Dishub dan Kecamatan Rabu(14/6/23). LOETR/DUTA

Kecamatan Gedangan sudah membuat surat ke Dishub Sidoarjo terkait pemasangan rambu larangan parkir atau berhenti di Jalan Gatot Subroto.

"Surat ke Kadishub Sidoarjo sedang proses tanda tangan Bu Camat,"

ujar sekretaris Kecamatan Ardi.

Senada pihak Dishub Kabupaten Sidoarjo sendiri saat ini sedang berkoordinasi dengan Pemdes Karangbong, mengait pemasangan rambu dilarang parkir dan kelas jalan. ● Loe

SAADAH MUHDLOR BUKA WORKSHOP IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BAGI GURU DAN PENDIDIK PAUD



Sa'adah Muhdlor saat buka kurikulum merdeka.

Sidoarjo, Pojok Kiri

Yayasan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sidoarjo menyelenggarakan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka bertempat di Aula SMPN 4 Sidoarjo yang digelar mulai tanggal 13-14 Juni 2023.

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran baik di tingkat pendidikan bawah sampai perguruan tinggi, sehingga penerapan kurikulum ini akan berdampak luas pada anak didik termasuk bagi masyarakat.

Kurikulum sendiri menjadi sebuah patokan dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran pada lembaga pendidikan, dengan demikian konsep kurikulum yang wajib dipegang oleh tenaga pendidik adalah kurikulum yang sesuai dengan perkembangan serta peraturan yang telah ditentukan.

Kegiatan workshop diikuti oleh peserta sebanyak 363 orang yang terdiri dari 178 orang pada sesi pertama, dan 185 orang pada

sesi kedua ini berasal dari guru dan kalangan pendidik PAUD DWP se-Kabupaten Sidoarjo. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Hj. Sa'adah Ahmad Muhdlor, S.Hum selaku Pembina Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo.

"Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara dalam minat membaca. Dampak negatif dari kurangnya minat membaca ini menjadikan masyarakat kita tidak mampu bersaing dengan bangsa lain karena minimnya perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu faktor pemicunya yaitu kurang maksimalnya perkembangan anak pada masa usia emas (golden age)" ujar Ning Sasha sapaan Hj. Sa'adah Ahmad Muhdlor dalam sambutannya. Selasa (13/6/2023).

"Dengan diimplementasikannya Kurikulum Merdeka ini pada pembelajaran PAUD, marilah kita maksimalkan perkembangan kognitif anak dengan metode-metode yang menyenangkan. Kita dukung

anak-anak untuk menguasai kemampuan dasarnya terlebih dahulu dan tidak ada lagi ujian calistung untuk anak-anak PAUD yang akan masuk SD" tambahnya.

Melalui slogan "Satu Tim Satu Tujuan, Transisi PAUD ke SD Menyenangkan" yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana, Ny. Sudarwanti, M.Pd., Pengurus Yayasan DWP Sidoarjo ingin menjadikan momen yang positif ini untuk saling meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan dalam upaya mencerdaskan anak bangsa yang lebih berkualitas. Penyampaian materi oleh Narasumber Ibu Prof. Gunarti Dwi Lestari, M.Si., M.Pd dan Bapak Dr. Ng. Tirto Adi MP, M.Pd diikuti dengan sangat antusias oleh peserta.

Jajaran tenaga pendidik diharapkan agar selalu meningkatkan peran strategis yang siap membangun karakter bangsa, meningkatkan perannya dalam membina sekaligus sebagai suri tauladan yang baik bagi peserta didiknya di tengah-tengah masyarakat. (Khol/ Dy)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Stok Kosong, Lampu Mati Tak Diganti

SIDOARJO – Lampu LED untuk penerangan jalan umum (PJU) habis. Dampaknya, jika ada kerusakan lampu PJU, Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo tidak bisa melakukan penggantian. Hanya bisa perbaikan saja.

Kepala Bidang PJU Dishub Sidoarjo Arie Prabowo mengatakan, stok lampu LED sudah habis kemarin. Tahun ini, pihaknya hanya mendapatkan alokasi 800 buah lampu. Yakni, lampu LED 120 watt sebanyak 400 buah dan lampu LED 90 watt sebanyak 400 buah. Padahal, kebutuhannya sangat banyak. "Kami tiap bulan rata-rata pergantian sekitar 200 buah. Kami usulkan 3.000 buah, tapi hanya dapat alokasi 800 buah," ungkapnya.

Karena saat ini sudah habis, Arie mengaku harus menunda dulu jika ada lampu yang rusak dan butuh penggantian. "Kalau untuk perbaikan tetap bisa kami lakukan. Tapi, kalau memang harus ganti, ya kami tunda," jelasnya.

Tiap ada laporan kerusakan lampu, pihaknya tetap menindaklanjuti dengan pengecekan ke lokasi. Jika masih bisa diperbaiki, akan diperbaiki. Jika tidak, penggantian baru dilaksanakan menjelang akhir tahun nanti. Pengadaan lampu kembali dilakukan sekitar September mendatang lewat perubahan anggaran keuangan (PAK).

"Kami usulkan tambahan 2.200 buah lampu saat PAK mendatang," katanya. Artinya, masih sekitar tiga bulan lagi penggantian lampu rusak baru bisa dilakukan. Padahal, hampir setiap hari ada saja aduan lampu PJU mati di Sidoarjo. Baik langsung ke Dishub Sidoarjo maupun lewat *call center* 112 Sidoarjo.

Kemarin (14/6) ada satu aduan masuk pada *call center* 112. Yakni, aduan lampu PJU mati di Desa Sumberrejo Kecamatan Wonoayu. Ada tiga titik PJU yang mati di sana. (uzi/c17/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dua Candi di Pamotan Diduga Lumbung Padi Kerajaan Majapahit

SIDOARJO - Desa Pamotan, Porong, konon merupakan salah satu wilayah yang sangat berpengaruh pada masa Kerajaan Majapahit. Dugaan itu diperkuat dengan adanya dua buah reruntuhan candi yang ditemukan.

Dua candi tersebut dinamakan Pamotan 1 dan Pamotan 2. Dua candi yang berjarak tidak terlalu jauh itu ditemukan dengan waktu yang berbeda. Candi Pamotan 1 berbentuk bata yang disusun membentuk punden berundak di tengah kubangan air. Luasnya sekitar 25 meter persegi. "Ini ditemukan sekitar tahun 1974. Saat itu karena digali oleh paklik saya, lah nemu patung arca," ungkap Lilik Umilastri, keponakan juru kunci Candi Pamotan.

Arca tersebut kemudian dibeli oleh orang Surabaya. Penggalian dilakukan kembali. Tujuannya ingin mendapatkan banyak yang bisa dijual. Namun, hasilnya nihil. Pada 1977, penggali menemukan candi. Air yang berada di sekitar Candi Pamotan 1 tersebut adalah air hujan yang tertampung.

Candi Pamotan 2 sebenarnya sudah ditemukan oleh seorang arkeolog Belanda pada 1903. Tapi, Candi Pamotan 2 yang dijuluki candi keramat ini tidak dihiraukan warga karena letaknya yang berada di tengah makan umum. Nah, baru setelah Candi Pamotan 1 ditemukan, diketahui bahwa keduanya memiliki kaitan.

Lilik mengungkapkan, dari cerita pamannya diketahui dua candi tersebut diduga bagian dari Kerajaan Majapahit. "Katanya begitu, tapi saya juga tidak tahu pasti," jelasnya. Beberapa penelitian mengungkap konon dua candi tersebut merupakan lokasi lumbung padi semasa Kerajaan Majapahit. Kendati demikian, belum ada literasi atau penelitian resmi mengenai berapa umur dua candi di Pamotan itu. (eza/c17/any)

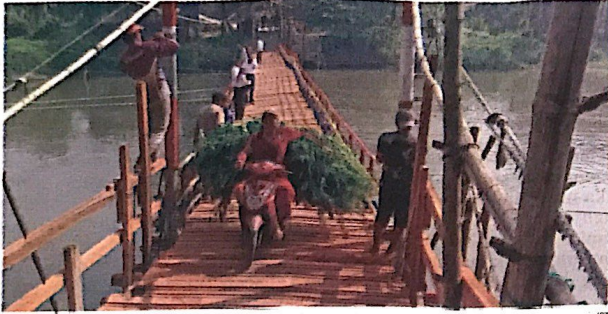


ALBAC BEZA/JAWA POS

BERUSIA RATUSAN TAHUN: Candi Pamotan 1 di Desa Pamotan, Porong, ditemukan karena warga sekitar yang ingin mencari arca untuk dijual.

Jawa Pos

Dua Desa Bangun Jembatan Apung untuk Hubungkan Sidoarjo dan Gresik



LEBIH DEKAT: Jembatan apung yang dibangun oleh Desa Bogempinggir dan Sumberame mulai dimanfaatkan masyarakat.

BALONGBENDO - Warga Desa Bogempinggir, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, dan Desa Sumberame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, kini mendapatkan kemudahan baru dalam perjalanan mereka. Hal itu karena adanya jembatan apung yang diresmikan Rabu (14/6). Sebelumnya, warga harus melakukan perjalanan sekitar tiga kilometer ke arah timur menuju jembatan atau menggunakan perahu tambang untuk men-

yeberangi sungai.

Ketua Bumdes Kidang Kencono Desa Sumberame Ahmad Zainuri mengungkapkan bahwa jembatan ini memiliki lebar 2,5 meter dan panjang 45 meter. Proses pembangunannya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Pihaknya menggunakan 80 drum plastik dan kayu Mahoni.

Dia menceritakan, awalnya di lokasi tersebut merupakan dermaga perahu tambang. Warga biasa memanfaatkan perahu tam-

bah untuk perjalanan mereka. Tarif yang dikenakan untuk melintasi jembatan apung ini sebesar Rp 2 ribu untuk sepeda motor.

Namun pada April 2017 lalu terjadi tragedi di sungai pecahan Kali Brantas tersebut. Saat itu, 12 penyeberang perahu tambang tenggelam karena arus yang deras. Tujuh di antaranya meninggal dunia.

Nah, pembangunan jembatan apung ini diharapkan bisa memudahkan

● Ke Halaman 10



Dua Desa Bangun...

warga dua desa di dua kabupaten. "Kini mereka bisa lebih cepat dan lebih aman dalam perjalanan," ungkapnya.

Ahmad Zainuri menjelaskan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan

hasil kerjasama antara Bumdes yang dipimpinnya dengan Pemdes Bogempinggir serta pihak ketiga sebagai pelaksana. Meskipun begitu, Ahmad Zainuri tidak berniat menghentikan operasional perahu tambang di sekitar lokasi. "Justru sebaliknya, jam opera-

sional mereka kan terbatas, sedangkan operasional di sini 24 jam nonstop. Mereka juga kami pekerjaan di sini," terangnya.

Selain itu, Ahmad Zainuri juga mengizinkan warga sekitar untuk membuka warung di sekitar dermaga jembatan

apung ini. Sebagai upaya menciptakan peluang usaha bagi warga sekitar.

Kepala Desa Bogempinggir Sutikno menyampaikan bahwa banyak warga desanya yang bekerja di pabrik di Kecamatan Wringinanom. "Tentu jembatan ini sangat membantu. Kini

mereka tidak perlu khawatir saat menyeberangi sungai menuju tempat kerja dan pulang," imbuhnya.

Mneurut dia, dengan jembatan apung yang dapat menyesuaikan ketinggian arus sungai, warga yang melintas menjadi lebih aman. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

IKATEMI Dan Poltekkes Surabaya Gelar Pendampingan Dan Penyuluhan Alat Kesehatan Bagi 6 Puskesmas Di Sidoarjo

REDAKSI 14 JUNI 2023 15:59:35



ABDIMAS - Pengurus DPC IKATEMI dan Poltekkes Surabaya, menggelar Pengabdian Masyarakat (Abdimas) terkait perawatan alat diagnostik kepada 6 puskesmas binaan bersama Kepala Dinkes Pemkab Sidoarjo di ruang pertemuan Dinkes Pemkab Sidoarjo, Rabu (14/06/2023)



Sidoarjo (republikjatim.com) - Pengurus DPC Ikatan Elektromedis Indonesia (IKATEMI) Kabupaten Sidoarjo bersama Politeknik Kesehatan (Poltekkes), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Surabaya, melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat (Abdimas). Kegiatan ini bertajuk Pendampingan dan Penyuluhan Kader Puskesmas melalui Edukasi Pentingnya Pemeliharaan dan Pemantauan Fungsi Peralatan Medis.

Kegiatan Tahun 2023 ini diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan serta pendampingan kepada 6 puskesmas yang ada di Sidoarjo. Sosialisasi itu, terkait perawatan alat diagnostik. Sebelum melakukan pelepasan tim penyuluhan, kegiatan dibuka secara langsung Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo di ruang pertemuan Kantor Dinkes Pemkab Sidoarjo, Rabu (14/06/2023).

"Program kali ini bertemakan Pendampingan dan Penyuluhan Kader Puskesmas Pentingnya Pemeliharaan dan Pemantauan Fungsi Peralatan Medis. Ada sebanyak 6 puskesmas yang nanti akan kita dampingi. Diantaranya, Puskesmas Ganting, Medaeng, Trosobo, Sidodadi, Urangagung dan Puskesmas Kepadangan," ujar Ketua IKATEMI Sidoarjo, Ahmad Mukhlis kepada republikjatim.com, Rabu (14/06/2023) di sela-sela acara.

Lebih jauh, Ahmad Mukhlis menjelaskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan sebagai bentuk dukungan jurusan Teknik Elektromedis Politeknik Kesehatan dengan metode edukasi melalui penyuluhan dan layanan. Selain itu, kegiatan ini sekaligus mengaplikasikan ilmu sesuai bidang kompetensi. Yakni elektromedis ke pengguna peralatan.

"Dalam hal ini, tentunya puskesmas yang menjadi titik pelayanan kesehatan masyarakat terdepan di tingkat desa dan kecamatan," imbuhnya.

Program Pengabdian Masyarakat (Abdimas) ini dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai 14 Juni 2023 dilakukan dengan menggelar kunjungan di beberapa puskesmas. Terutama kunjungan ke 6 puskesmas yang ada di Sidoarjo itu.

"Sidoarjo ini merupakan daerah binaan kami. Diharapkan petugas tenaga kesehatan puskesmas bisa mengubah perilaku dalam penanganan alat kesehatan menjadi lebih baik sesuai standar operasional peralatan kesehatan," tegasnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Dalam Kunjungan itu, nantinya akan terbagi menjadi 6 tim. Bahkan setiap tim masing-masing berjumlah 10 orang diantaranya dosen dan mahasiswa. Mereka melakukan pengenalan, penyuluhan dan pendampingan dalam menangani alat kesehatan sesuai standar prosedur penggunaan alat.

"Tujuannya meminimalisir human error (kesalahan manusia) saat penggunaan alat itu untuk melayani pasien," jelasnya.



Sementara Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya, Luthfi Rusyadi menambahkan kegiatan pengabdian masyarakat ini, terkait pemberian penyuluhan dan edukasi kepada para kader puskesmas untuk memantau dan pemeliharaan sejumlah peralatan medis. Hal ini menjadi kerjasama antara Poltekkes Kemenkes Surabaya, DPC IKATEMI Sidoarjo dan Dinkes Pemkab Sidoarjo.

"Tujuan kita nanti akan memberi satu edukasi kepada teman-teman pengguna alat medis yang ada di puskesmas. Kedua tentunya akan melakukan kalibrasi alat-alat yang digunakan di puskesmas agar ada jaminan operasional terhadap alat itu. Intinya kita akan terus menjalin kerjasama ini agar bisa lebih dekat lagi dengan Sidoarjo," jelasnya.

Kepala Dinkes Pemkab Sidoarjo, Dr Fenny Apridawati berharap dengan kegiatan ini bisa menambah wawasan seputar alat kesehatan dan peralatan kesehatan yang ada di puskesmas. Bahkan alat-alat kesehatan itu bisa lebih terjaga keamanan dan akurasinya.

"Kami sangat terkesan dengan kegiatan pengabdian masyarakat dari Poltekkes Surabaya dan DPC IKATEMI Sidoarjo. Programnya ini sangat bermanfaat, terutama dalam menangani alat kesehatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini bisa membantu program pemerintah dalam penanganan alat kesehatan untuk mengurangi risiko kerusakan alat yang fatal," tandas mantan Kepala Disnaker Pemkab Sidoarjo ini. Hel/Waw





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidang di PTUN Belum Kelar, Pemkab Sidoarjo Gugat Perdata PT ISS

Admin 

Wednesday, June 14, 2023, June 14, 2023 WIB



Kadishub Sidoarjo, Beny Airlangga Yogaswara.



DNN, SIDOARJO – Perseteruan antara Pemkab Sidoarjo dengan koleganya di bidang pengelolaan parkir tepi jalan umum dan lokasi khusus, PT Indonesia Sarana Service (ISS) semakin meruncing. Belum kelar ‘pertarungan’ mereka di PTUN, kini Pemkab membuka arena baru di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

“Selasa kemarin, JPN (Jaksa Pengacara Negara-red) sudah mengirimkan gugatan perdata ke PN,” kata Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo, Beny Airlangga Yogaswara yang dihubungi melalui ponselnya, Rabu (14/06/2023) sore tadi.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dikatakannya, materi utama gugatannya tersebut mempersoalkan kewajiban PT ISS terkait imbal jasa kerjasama sebesar Rp 32,09 Miliar yang belum terbayarkan hingga saat ini. Apalagi, perusahaan tersebut sudah melakukan pengelolaan parkir tersebut selama satu tahun. “Resminya akan tanggal 18 nanti,” tambah Beny.

Menurut mantan Asisten II Sekda Sidoarjo itu, gugatan perdata itu menunjukkan kesungguhan instansi yang dipimpinnya untuk mengutip dana dari masyarakat melalui PT ISS yang seharusnya mengisi pundi-pundi pendapatan daerah. “Biar jelas semuanya, bahwa kami tidak main-main dalam perkara ini. Jadi apapun hasil sidang di PTUN nanti, kita layangkan dulu gugatan ini,” tandas Beny.



Senyampang proses hukum yang tengah berjalan di PTUN maupun PN Sidoarjo. Pihak Pemkab juga terus memproses rencana pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Parkir yang ditangani Bagian Kerjasama.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DWP Sidoarjo Gelar Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Guru dan Pendidik PAUD

Penulis Administrator - Juni 14, 2023



Sidoarjo, beritajatim.net – Yayasan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sidoarjo menyelenggarakan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka bertempat di Aula SMPN 4 Sidoarjo yang digelar mulai tanggal 13-14 Juni 2023.



Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran baik di tingkat pendidikan bawah sampai perguruan tinggi, sehingga penerapan kurikulum ini akan berdampak luas pada anak didik termasuk bagi masyarakat.

Kurikulum sendiri menjadi sebuah patokan dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran pada lembaga pendidikan, dengan demikian konsep kurikulum yang wajib dipegang oleh tenaga pendidik adalah kurikulum yang sesuai dengan perkembangan serta peraturan yang telah ditentukan.

Kegiatan workshop diikuti oleh peserta sebanyak 363 orang yang terdiri dari 178 orang pada sesi pertama, dan 185 orang pada sesi kedua ini berasal dari guru dan kalangan pendidik PAUD DWP se-Kabupaten Sidoarjo. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Hj. Sa'adah Ahmad Muhdlor, S.Hum selaku Pembina Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara dalam minat membaca. Dampak negatif dari kurangnya minat membaca ini menjadikan masyarakat kita tidak mampu bersaing dengan bangsa lain karena minimnya perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu faktor pemicunya yaitu kurang maksimalnya perkembangan anak pada masa usia emas (golden age)" ujar Ning Sasha sapaan Hj. Sa'adah Ahmad Mudhlor dalam sambutannya. Selasa (13/6/2023).

"Dengan diimplementasikannya Kurikulum Merdeka ini pada pembelajaran PAUD, marilah kita maksimalkan perkembangan kognitif anak dengan metode-metode yang menyenangkan. Kita dukung anak-anak untuk menguasai kemampuan dasarnya terlebih dahulu dan tidak ada lagi ujian calistung untuk anak-anak PAUD yang akan masuk SD" tambahnya.

Melalui slogan "Satu Tim Satu Tujuan, Transisi PAUD ke SD Menyenangkan" yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana, Ny. Sudarwanti, M.Pd., Pengurus Yayasan DWP Sidoarjo ingin menjadikan momen yang positif ini untuk saling meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan dalam upaya mencerdaskan anak bangsa yang lebih berkualitas. Penyampaian materi oleh Narasumber Ibu Prof. Gunarti Dwi Lestari, M.Si., M.Pd dan Bapak Dr. Ng. Tirto Adi MP, M.Pd diikuti dengan sangat antusias oleh peserta.

Jajaran tenaga pendidik diharapkan agar selalu meningkatkan peran strategis yang siap membangun karakter bangsa, meningkatkan perannya dalam membina sekaligus sebagai suri tauladan yang baik bagi peserta didiknya di tengah-tengah masyarakat. @red





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pasar Wadungasri Sidoarjo Makin Sepi Ditinggal Pelanggan, Ini Penyebabnya

MH/Tim iNewsSidoarjo.id - Rabu, 14 Juni 2023 | 17:58 WIB



Bambang Haryo Soekartono (BHS) didampingi anggota DPRD Sidoarjo, Yunik Nur Aini saat berkunjung ke pasar Wadungasri, Waru, Sidoarjo. (Foto : iNewsSidoarjo.id).

iNewsSidoarjo.id

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Pedagang Pasar Wadung Asri, Kecamatan Waru, Sidoarjo mengeluhkan semakin sepi pembeli di pasar tradisional tersebut. Penyebabnya, kondisi pasar yang kumuh dan sering banjir saat musim hujan menjadikan salah satu faktor kurang nyamannya pembeli.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Wadungasri, Sugito mengaku, perawatan pasar Wadungasri selama ini kurang mendapatkan perhatian dari Pemkab Sidoarjo.

"Saya berjualan di sini sudah 30 tahun, kalau musim hujan pasti banjir. Itu karena posisi sungai buntung lebih tinggi dari pasar Wadungasri. Para pedagang berharap pasar ini ditinggikan agar tidak ada banjir lagi," ucap Sugito ketika ditemui iNewsSidoarjo.id, Rabu (14/6/2023).

BHS Minta Pemkab Perhatikan Pasar Tradisional

Politisi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) ikut menyoroti keluhan pedagang tersebut. Menurut dia, pasar adalah pusat ekonomi kerakyatan yg sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintahan.

Sebab, menurut dia, apabila terjadi kegagalan di sektor ekonomi kerakyatan, maka dampaknya sangat besar terhadap wilayah tersebut.

"Pasar Wadungasri ini lokasinya sangat strategis dan harusnya menjadi tumpuan dari masyarakat konsumen untuk berbelanja dipasar tersebut. Pasar ini juga merupakan etalase Sidoarjo karena berada diwilayah perbatasan Sidoarjo sebelah utara," ucapnya ketika bersama tim BHS peduli.

iNewsSidoarjo.id



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Tentunya, potensi ini bisa menjadi daya tarik, tidak hanya masyarakat Sidoarjo tetapi juga masyarakat Surabaya sisi selatan untuk berbelanja dipasar Wadungasri tersebut," ungkap dia dengan didampingi oleh anggota DPRD Sidoarjo, Yunik Nur Aini saat berkunjung langsung ke pasar tradisional tersebut.

Berkenan kondisi pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo diantaranya Pasar Wadungasri yang dinilai kurang mendapatkan perhatian dari Pemkab Sidoarjo, BHS merasa prihatin.

iNewsSidoarjo.id

Menurut BHS, permasalahan pasar Wadung Asri tersebut sudah dijanjikan oleh pemkab untuk dibenahi di tahun 2020-2021. Namun hingga 3 tahun lebih jalannya pemerintahan, belum ada perubahan yang dilakukan untuk pasar tersebut.

"Saya tadi juga mengecek alat pemadam portable (apart) ternyata sudah kadaluarsa 1 tahun. Padahal alat ini sangat penting untuk keselamatan warga pasar. Untuk itu saya langsung membantu mengisi 3 pemadam yang kadar luasa tadi," jlentrehnya.

Sementara itu anggota DPRD Sidoarjo dari partai Gerindra, Yunik Nur Aini yang ikut dalam kunjungan tersebut menyatakan bahwa di tahun 2023 ini pemkab Sidoarjo sudah menganggarkan untuk pembersihan gorong gorong pasar yang tersumbat.

"Salah satu penyebab sering banjirnya pasar ini saat musim hujan karena gorong gorong tidak berfungsi dengan baik. Untuk itu tahun ini sudah dianggarkan pembersihan gorong gorong untuk dialirkan ke sungai buntung," pungkasnya.

Editor : Nanang Ichwan

iNewsSidoarjo.id



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DWP Sidoarjo Gelar Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Guru dan Pendidik PAUD

June 14, 2023 · admin

f Share

🐦 Tweet

📌 Pin

G+ Google+

0 SHARES



Pembina Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo
Hj.Sa'adah Ahmad Muhdlor, S.Hum





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SIDOARJO (journalsidoarjo.com) – Yayasan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sidoarjo menyelenggarakan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka bertempat di Aula SMPN 4 Sidoarjo yang digelar mulai tanggal 13-14 Juni 2023.

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran baik di tingkat pendidikan bawah sampai perguruan tinggi, sehingga penerapan kurikulum ini akan berdampak luas pada anak didik termasuk bagi masyarakat.

Kurikulum sendiri menjadi sebuah patokan dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran pada lembaga pendidikan, dengan demikian konsep kurikulum yang wajib dipegang oleh tenaga pendidik adalah kurikulum yang sesuai dengan perkembangan serta peraturan yang telah ditentukan.

Kegiatan workshop diikuti oleh peserta sebanyak 363 orang yang terdiri dari 178 orang pada sesi pertama, dan 185 orang pada sesi kedua ini berasal dari guru dan kalangan pendidik PAUD DWP se-Kabupaten Sidoarjo. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Hj. Sa'adah Ahmad Mudhlor, S.Hum selaku Pembina Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo.

"Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara dalam minat membaca. Dampak negatif dari kurangnya minat membaca ini menjadikan masyarakat kita tidak mampu bersaing dengan bangsa lain karena minimnya perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu faktor pemicunya yaitu kurang maksimalnya perkembangan anak pada masa usia emas (golden age)" ujar Ning Sasha sapaan Hj. Sa'adah Ahmad Mudhlor dalam sambutannya.

"Dengan diimplementasikannya Kurikulum Merdeka ini pada pembelajaran PAUD, marilah kita maksimalkan perkembangan kognitif anak dengan metode-metode yang menyenangkan. Kita dukung anak-anak untuk menguasai kemampuan dasarnya terlebih dahulu dan tidak ada lagi ujian calistung untuk anak-anak PAUD yang akan masuk SD" tambahnya.



Melalui slogan "Satu Tim Satu Tujuan, Transisi PAUD ke SD Menyenangkan" yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana, Ny. Sudarwanti, M.Pd., Pengurus Yayasan DWP Sidoarjo ingin menjadikan momen yang positif ini untuk saling meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan dalam upaya mencerdaskan anak bangsa yang lebih berkualitas. Penyampaian materi oleh Narasumber Ibu Prof. Gunarti Dwi Lestari, M.Si., M.Pd dan Bapak Dr. Ng. Tirto Adi MP, M.Pd diikuti dengan sangat antusias oleh peserta.

Jajaran tenaga pendidik diharapkan agar selalu meningkatkan peran strategis yang siap membangun karakter bangsa, meningkatkan perannya dalam membina sekaligus sebagai suri tauladan yang baik bagi peserta didiknya di tengah-tengah masyarakat. (R1)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Sidoarjo Pastikan Penyaluran Bansos Beras ke KPM Berjalan Lancar

June 14, 2023 admin

f Share

🐦 Tweet

P Pin

G+ Google+

0 SHARES



Penyerahan secara simbolis Bantuan Sosial Beras (BSB) tahap III dari Kemensos RI

JS JURNAL
SIDOARJO

SIDOARJO (jurnalsidoarjo.com) – Bantuan Sosial Beras (BSB) tahap III dari Kemensos RI untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Keluarga Harapan (PKH). BSB tahap III Kabupaten Sidoarjo mulai disalurkan awal Juni Lalu, penyerahan secara simbolis oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali kepada lima desa di Kecamatan Tulangan, Rabu (14/06).

Penyerahan BSB pertama di Desa Pangkemi dengan jumlah penerima BSB 220 KPM. Desa kedua, Desa Gelang sebanyak 282 KPM dan desa ketiga, Desa Kepatihan diserahkan langsung oleh Bupati Sidoarjo kepada 442 KPM. Dilanjut ke Desa Kenongo dengan jumlah penerima sebanyak 187 KPM. Terakhir di Desa Singopadu 280 KPM.

“Bantuan pangan ini semua desa di Kabupaten Sidoarjo mendapatkan BSB. BSB tahap III ini merupakan tahap akhir. Program ini baik, harus dipastikan hingga ke penerimanya,” ujar Gus Muhdlor.

Ia juga memastikan ke Kepala Desa Kepatihan, bahwa semua warga Desa Kepatihan menerima BSB ini mulai tahap 1 hingga tahap 3. Kemarin Kabupaten Sidoarjo mendapat jatah 276 ribu sak beras. Harapannya program pusat ini berlanjut tahun depan.

“Saya berpesan kalau disekitar panjenengan semua, jika ada warga yang tidak mampu, atau kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, segera lapor ke Dinsos Kabupaten,” katanya.

Turunnya Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor selain melakukan evaluasi juga sosialisasi tentang perubahan mekanisme penerimaan bantuan sosial yang menggunakan sistem digital.

“Bahwa setelah ini nantinya penerima KPM undangan berbasis digital, nantinya dibawah bagian kanan pojok bawah bagian kanan pasti ada barcode nya. Barcode ini ketika di scan langsung akan mengirimkan informasi kepusat bahwasannya nama disurat itu telah menerima bantuan,” katanya. (E1)